

(Esei Satu)

Pemimpin dalam Masyarakat yang Tertawan¹

Pengantar

Dalam perspektif kebudayaan, masalah kepemimpinan dilihat sebagai cara bagaimana masyarakat mengatur hidupnya. Konstelasi, struktur, sistem, dan mekanisme kepemimpinan merupakan cara masyarakat “mengorganisasikan” dirinya dalam satu proses kebudayaan, dengan tujuan-tujuan tertentu. Sebagai satu proses kebudayaan, hal-hal itu terus berubah, dan kita dituntut untuk mencari “model organisasi” yang paling sesuai dengan diri kita.

Dalam kenyataannya, proses mencari itulah yang selalu terjadi. Hal itu disebabkan ke depan, akan terjadi tuntutan, kondisi, dan faktor-faktor baru, baik dari dalam maupun dari luar masyarakat. Faktor-faktor itu banyak ragamnya, tapi secara umum terjadi akibat praktik dan organisasi kebudayaan sudah dirasakan tidak memadai lagi karena tuntutan perubahan sosial yang terjadi. Akibatnya, kebudayaan berproses untuk “membusuk”. Dalam puncak pembusukan itu, terjadilah kehebohan dan badai. Setelah reda, muncul benih-benih baru.

Dalam situasi yang bertumbuhan itu, masyarakat akan kembali mencari pola organisasi berbudaya yang paling sesuai dengan dirinya. Mungkin melalui berbagai percobaan dan konflik. Akan tetapi, di atas semua itu adalah upaya masyarakat mencoba mengatasi berbagai ketidaknyamanan yang ditemuinya agar bisa hidup secara lebih berkualitas dan bermartabat.

Masalahnya adalah apa yang terjadi hari-hari ini, dan bagaimana kita memproyeksikan masalah tersebut ke depan. Bagaimana kita membaca peluang dan tantangan praktik organisasi kepemimpinan nasional.

Siapa Pengawal Pemimpin?

Terdapat adegan dan dialog menarik dalam film *Shadowless Sword*, sebuah film silat klasik berlatar tahun 900-an Masehi, bikinan Korea. Dikisahkan bahwa seorang pangeran yang masih muda tersingkir dari konstelasi politik dan kekuasaan. Sebetulnya tidak terlalu pas dikatakan tersingkir, lebih pas disebut mengundurkan diri karena tidak mau terlibat dengan kekacauan dan kebusukan.

Ia memilih mengembara dan terjun menjadi bagian dari masyarakatnya. Ia pelajari masyarakatnya secara seksama dan bertahun-tahun. Dalam pengembaraan itu ia ditemani seorang pengawal wanita yang setia dan bersih hati. Pada suatu malam, pangeran itu ingin mengajak bercinta pengawalnya yang cantik dan berilmu silat tinggi. Tidak ada paksaan dalam ajakan bercinta itu, yang ada sebetulnya justru kasih sayang.

¹ Beberapa gagasan dalam tulisan ini pernah menjadi bahan diskusi pada Diskusi Kepemimpinan Partai Keadilan Sejahtera (Jajaran Pimpinan PKS se-Sulawesi) di Jakarta, 9 Juni 2009.

Pengawal itu menolak dengan halus. Padahal pengawal itu sangat mencintai Sang Pangeran. Demikian pula sebaliknya. Pengawal itu berkata, “Saya masih menginginkan Pengeran kelak akan menjadi raja. Seorang raja (pemimpin) tidak boleh menyimpan rahasia”. Dalam geram yang tertunda, Pangeran itu termenung. Dan ia semakin mengagumi pengawalnya itu.

Kelak Sang Pengeran memang menjadi raja. Ia kembali masuk ke dalam puncak kekuasaan, lebih karena dukungan kebudayaan dan rakyatnya, bukan karena kasak-kusuk politik, atau kekuatan modal. Memang ada konflik keras yang harus dihadapi. Hal itu lebih sebagai cara untuk membersihkan kebusukan yang harus dibersihkan.

Dalam sejarah kepemimpinannya, Pangeran yang Raja itu memang berusaha hidup asketis, tidak mengumbar hawa nafsu kekuasaan, dan secara moral tidak pernah berselingkuh dengan berbagai “kenakalan” yang kelak menjadi beban dirinya. Ia tidak punya rahasia yang membuat “moralnya cacat”.

Terbukti, di kemudian hari ia menjadi raja yang sukses dan disegani rakyatnya. Ia memimpin negaranya dengan nyaman dan tangguh, karena ia memang tidak memiliki rahasia yang membuat dirinya malu (pada dirinya sendiri). Ia memiliki kekuatan dan kebersihan moral untuk menegakkan moral bangsanya. Ia memimpin dengan penuh kebijakan dan cinta.

Bagaimana kita membaca kisah itu dalam melihat pemimpin dan kepemimpinan kita?

Tantangan: Kemiskinan Sosial

Hal utama yang membuat para pemimpin kita tidak tangguh adalah bahwa terdapat sejumlah proses dalam pengalaman hidup pemimpin dan calon pemimpin kita yang membuat hidup dan moralnya “tidak bersih”. Di Indonesia, menjaga kebersihan hidup itu, kini tampaknya menjadi semakin sulit.

Ada beberapa sebab mengapa menjadi sulit. *Pertama*, sumber utamanya adalah kemiskinan ekonomi. Kemiskinan menyebabkan setiap orang berusaha *survival* agar ke luar dari kemiskinan itu dalam berbagai cara. Dalam cara-cara *survival* itu, orang terpaksa melakukan siasat-siasat. Sangat mungkin siasat-siasat tersebut berselingkuhan dengan hal-hal yang tidak benar (secara moral).

Dalam kondisi itu, orang menjadi tidak peduli dengan nasib orang lain, yang penting diri sendiri selamat. Orang akan berusaha mengamankan hidupnya, dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk itu adalah mengumpulkan “investasi” sebanyak yang bisa dilakukan. Maka manipulasi, korupsi uang, korupsi sosial, korupsi moral, tidak dapat dihindarkan.

Kedua, kemiskinan menyebabkan kebodohan massal, atau bahkan kemiskinan sosial. Kemiskinan menyebabkan orang tidak bisa melakukan banyak

kegiatan “ekstra”, kecuali kesibukan untuk mencari makan. Yang tidak miskin, dengan persentasi yang sangat sedikit, akan berusaha semaksimal mungkin tidak terjebak dalam kemiskinan itu. Bahkan pada tingkat tertentu justru memperjual-belikan dan mempolitisasi kemiskinan.

Dalam kondisi itu, orang tidak dapat mengikuti aturan hidup yang santun, beretika, dan beradab. Dalam kondisi kemiskinan sosial itu, siapa yang santun, beretika, dan beradab, akan tergilas, atau mungkin terlihat dekaden. Kita tahu, sekarang orang yang berusaha hidup jujur, akan hancur. Atau seperti orang tidak normal yang hidup dalam dunia yang normal (dalam kebusukan).

Ketiga, dalam prosesnya, setiap orang terlibat dalam kehidupan seperti itu. Ada suatu nilai budaya dalam masyarakat kita yang menganggap bahwa hidup itu terlihat berhasil (*jadi orang*) jika secara material ia juga terlihat sukses. Kemudian orang berusaha sedapat mungkin agar hidup terlihat sukses, agar terlihat sudah *menjadi orang*.

Padahal, pengertian sukses seperti itu tidak selayaknya dipertahankan. Kehidupan sukses itu adalah bahwa seseorang berhasil menjaga konsistensi kebersihan kemanusiaannya. Pengawal raja yang kita ceritakan di atas, walaupun pada akhirnya ia mati dalam pertempuran, ia sukses menjadi manusia. Hidupnya yang hanya sebagai prajurit akan dikenang sebagai pahlawan yang bersih dan setia. Ia akan dikenang abadi oleh masyarakat Korea, sekaligus sebagai pembangkit semangat untuk selalu membela kemuliaan moral.

Jadi Tawanan Rahasia

Setiap orang tentu ingin hidupnya sukses. Bahkan sukses dunia akhirat. Begitulah, sedikit banyak, kebudayaan (dan agama) mengajarkan kita. Konsep “menjadi orang” adalah konsep kesuksesan. Ternyata, secara umum konsep tersebut berkonotasi; menjadi kaya. Bagaimana kita bisa menjadi kaya?

Dalam berbagai cara menempuh dan menuju sukses itulah kita terpaksa, dan juga dikondisikan, untuk berselingkuh dengan berbagai hal yang tidak benar. Yang penting selamat dan sukses.

Sebagai akibatnya, banyak hal yang tidak benar terpaksa kita jalani dalam hidup kita itu. Kelak, di kemudian hari, kita menjadi tawanan rahasia yang menyesak dada. Rahasia itu akan menjadi beban moral dalam hidup kita. Kita merasa hidup kita tidak bersih, dan secara moral menjadi kikuk menjaga kebersihan hidup masyarakat.

Itulah sebabnya, mengapa hampir sebagian besar pemimpin kita, termasuk kita sendiri, menjadi tidak bisa tegas, bahkan ketika kejahatan (seperti KKN) terjadi di depan mata. Itu antara lain disebabkan jika mereka (para pemimpin) berusaha tegas, maka ketidakbersihan moral (tawanan rasia) itu akan dilepaskan orang.

Masyarakat juga menjadi serba takut dan penakut. Karena merasa hidup dalam “dunia yang tidak ada jaminan keselamatan terhadap dirinya”, mereka pun telah tertawan untuk mencari keselamatan masing-masing. Bahkan masyarakat hampir tidak memiliki kemampuan (tidak mau) untuk menjadi saksi, menjadi pengawal terhadap kejahatan karena ketakutan bahwa menjadi saksi atau pengawal pun sangatlah berbahaya.

Memahami kondisi itu, pemimpin kita menjadi serba ragu. Karena berbagai keraguan dan ketidaktegasan itu, negara kita secara ala kadarnya. Mayoritas kemiskinan, kekacauan, dan ketidaknyamanan berjalan bertumpang tindih dengan minoritas kemewahan, kesombongan, dan kemubaziran. Realitas sosial seperti itulah yang sehari-hari kita hadapi. Tidak ada moral teladan atau kebersihan moral yang mampu menegakkan kebenaran.

Kalau Harimaunya Ompong, Kambing pun Bersilat

Akan tetapi, terdapat kenyataan lain yang juga terjadi. Dalam kondisi “kecacatan moral” tersebut, situasi itu seperti, “Kalau Harimaunya ompong, maka kambing pun bersilat”. Mungkin gigi-gigi depan harimau itu masih tampak, tetapi gerahamnya (sesuatu yang tak tampak) sudah bertanggalan. Bagaimana harimau itu menjadi pemimpin yang “disegani”?

Dalam situasi kecacatan para pemimpin itu, para kambing pun bersilat. Tampaknya, persilatan mereka inilah yang menentukan permainan, termasuk di dalamnya menentukan siapa yang bakal jadi pemimpin. Hal itu dikarenakan mereka inilah yang kini memiliki mobilitas tinggi, yang memiliki akses langsung terhadap berbagai hal, secara umum mereka sangat terdidik, dan boleh dikata memiliki kemampuan “bersentuhan” dalam “mengelola” masyarakat.

Paling tidak terdapat empat jenis pemain silat, yang mereka pun ingin hidup sukses. Antara lain, pemain silat yang pragmatis-oportunis (biasanya orang partai dan politisi, maaf), pesilat *hit and run* atau *wait and see* (biasanya pengamat), pesilat pemburu harta dan kekuasaan (biasanya pengusaha yang politisi), pesilat idealis (biasanya seniman/sastrawan). Pertarungan di antara para pesilat ini, ikut menentukan kualitas pemimpin dan organisasi budaya kepemimpinan.

Dalam situasi pertarungan di antara pesilat itu, dengan agak ragu saya ingin mengatakan bahwa tampaknya pertarungan lebih didominasi oleh pesilat pragmatis-oportunis dan pesilat pemburu harta dan kekuasaan. Dalam dominasi itu, kita menjadi tahu pemimpin seperti apa yang bisa kita lahirkan. Hal yang terjadi adalah bahwa para pemimpin yang dijagokan adalah pemimpin yang kelak akan menguntungkan para pemain silat.

Terdapat suatu kondisi ketika pemimpin kita itu justru sangat bergantung pula dengan keberadaan pemain silat tersebut. Para pemain silat itulah yang merekayasa, yang membuat citra, yang bersumpah setia, yang mengatur harus

berkata apa, yang menjadi pembisik para pemimpin harus berbuat dan memutuskan apa. Tentu di balik itu kita pun tahu, situasi tawan menawan menjadi semakin jelas kongkalikongnya.

Sementara itu, sebetulnya masyarakat pada umumnya, tidak peduli lagi dengan permainan para pesilat itu. Mereka tetap sibuk mencari makan, sambil tetap main tipu kecil-kecilan, sambil ikut-ikutan pilih sana pilih sini, yang penting selamat dan bisa makan.

Mencari Peluang

Yang perlu diperhitungkan bukan tantangan dan peluang kepemimpinan nasional, tetapi peluang bagaimana kita memperbaiki kondisi yang runyam itu, agar kita secara keseluruhan terbebas dari tawanan. Sayangnya, tidak cukup banyak peluang yang kita miliki. Hal itu terjadi karena ada sejarah-budaya yang telah terlanjur.

Di antara yang sedikit itu antara lain, *pertama*, kita perlu mengorbankan diri menjadi pengawal (martir) untuk mengawal generasi sekarang (pemain silat sekarang), dan generasi masa depan agar menjadi pesilat yang mampu membebaskan dirinya dan memenangkan persilatan dengan cara yang jujur dan beretika. Seperti diketahui, di antara para pesilat itu, kelak di antaranya akan muncul (bertransformasi) beberapa harimau. Sebagai calon harimau, selayaknya harus ada mekanisme kontrol yang mampu menjaga kebersihan moral bersama, agar kelak dia tidak menjadi harimau yang ompong.

Kedua, harus ada ideologi budaya yang diperjuangkan secara konsisten dan taat asas. Dan itu perlu strategi dan praksis yang matang. Dalam situasi saling tertawan tersebut, orang-orang partai dan ormas (seperti Muhammadiyah dan NU) memiliki kesempatan yang lebih luas dalam mengartikulasikan dan mempraktikkan jurus-jurus silat yang bisa dimainkannya.

Ketiga, bukan soal siapa pemimpin dan siapa para pesilat, tetapi soal masyarakat yang tertawan. Adakah mekanisme yang mampu mengatur agar masyarakat tidak terus menerus ditawan sehingga mereka memiliki kebebasan untuk menjadi pengawal-pengawal kebudayaan, minimal bagi dirinya sendiri. Mekanisme itu adalah dengan cara pemimpin dan para pesilat bersedia membantu masyarakat agar terbebas dari kemiskinan sosial yang mencekik lehernya. Masyarakat harus dibebaskan dari komoditas dan objek politik kekuasaan.

Menjadi Martir

Dalam situasi yang tidak menyenangkan itu, apa yang masih bisa kita lakukan? Kembali ke soal pengawal yang jago silat di atas, siapa yang bersedia hidup dalam tarikat (jalan hidup) seperti yang dijalani pengawal di atas. Padahal, dengan ilmunya yang tinggi, pengawal cantik tadi memiliki kesempatan untuk hidup bersenang-senang. Dia memiliki kesempatan untuk menjadi wanita (*klangenan*) raja dan hidup dalam lingkaran kekuasaan utama sebuah kerajaan.

Jika dia memilih hidup itu, dalam cara dan pengertian yang lain ia tetap contoh orang yang sukses.

Pengawal itu tidak memilih itu. Dia memilih mati menjaga kesetiaan terhadap hati nuraninya. Bahkan dia tidak berpikir bahwa dengan hidup seperti itu dia akan menjadi pahlawan dan hidup abadi dalam benak masyarakatnya. Saya berharap, diam-diam akan ada di antara kita yang berusaha meniru tarikat hidup pengawal raja itu.

Saya paham, isu atau wacana tentang etika atau moral berbudaya merupakan hal yang cukup ketinggalan. Akan tetapi, dalam ruang kebudayaan, hanya itu yang masih tersisa, yang mungkin masih bisa diperjuangkan. * * *

(Esei Dua)

TEKNOLOGI MEMBUNUH DEMOKRASI

Perkembangan teknologi telah memperlihatkan bahwa teknologi bisa berbuat apa saja, bergantung bagaimana tujuan dan kepentingan manusia dalam memanfaatkan teknologi. Berdasarkan kenyataan itu, dalam hubungannya dengan demokrasi, teknologi sangat berpeluang membangun demokrasi.

Persoalannya adalah bahwa dalam beberapa hal pemanfaatan dan pengelolaan teknologi membutuhkan biaya dan pengetahuan yang tinggi, sehingga hanya kalangan tertentu saja yang bisa memanfaatkan dan mengelola teknologi. Misalnya saja dalam pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi media.

Di Indonesia (juga di sebagian besar tempat lain) pengelolaan teknologi informasi dan media di *back up* oleh pendana besar (pengusaha) atau pemerintah (lebih khusus lagi penguasa berwenang). Itu artinya, bahwa pengelolaan teknologi informasi dan media hampir dapat dipastikan dalam kepentingan bisnis atau dalam kepentingan penguasa. Belum lagi kongkalikong antara pengusaha dan penguasa, yang kita tahu sudah menjadi rahasia umum.

Memang terdapat persaingan untuk merebut khlayak dalam pengelolaan teknologi informasi dan media tersebut. Akan tetapi, ujung-ujungnya adalah selalu dalam frame bisnis atau penguasaan terhadap opini publik yang digiring dalam kepentingan tertentu.

Sejauh ini, hampir boleh dikata tidak ada institusi informasi dan media yang independen. Bahkan intitusi teknologi informasi dan media yang mengatasnamakan rakyat/masyarakat pun masih menggantungkan sumber dananya dari kalangan tertentu.

Berdasarkan kenyataan tersebut, kembali ke persoalan semula, bahwa teknologi secara teoretis berpeluang besar membangun demokrasi sejauh teknologi tersebut bisa dikelola untuk membangun demokrasi dalam berbagai arusnya. Akan tetapi, kenyataannya, hampir dapat dipastikan bahwa dalam praktiknya teknologi justru membunuh demokrasi.

Di Indonesia, belum terdapat bukti yang cukup signifikan bahwa teknologi informasi dan media telah dengan sukses membangun demokrasi. Memang ada indikasi bahwa proses demokrasi telah cukup berjalan di Indonesia. Akan tetapi, hal itu terjadi justru proses pembelajaran secara internal di tingkat masyarakat. Dalam keterbatasannya, masyarakat memiliki kearifan tersendiri bagaimana berdemokrasi.

Di Amerika, memang teknologi informasi dan media telah berhasil membangun sebagian besar proses demokrasi. Akan tetapi, yang menghancurkan proses di Amerika tersebut juga berdasarkan kekuatan teknologi itu sendiri yang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam skala internasional Amerika dan sekutunya bahkan menghancurkan demokrasi internasional karena memanfaatkan demokrasi untuk keperluan Amerika dengan mengabaikan nilai-nilai demokrasi universal.

Dengan demikian, teknologi selalu bermata pisau ganda. Di satu pihak memiliki kemampuan dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan demokrasi, tetapi di sisi lain justru sangat berpeluang membunuh demokrasi. Sejauh ini di Indonesia yang terjadi adalah pembunuhan terhadap demokrasi. * * *

(Esesi Tiga)

MEMBERDAYAKAN HANTU, MENYELAMATKAN INDONESIA

*Wahai para dukun dan paranormal Indonesia,
bersatulah, selamatkan Indonesia*

Keberadaan dan persoalan hantu dari dulu sudah merupakan sesuatu yang eksis di tengah masyarakat. Cuma dulu-dulu keberadaan hantu masih dianggap sebagai sesuatu yang eksklusif. Orang masih mengalami keterbatasan perspektif dan media untuk memahami dan menghadirkan hantu sebagai suatu bagian dari aktivitas publik. Hantu masih dianggap sebagai sesuatu yang misterius, abstrak, bahkan berkonotasi agak menakutkan.

Beberapa tahun belakangan ini keberadaan hantu menjadi bagian penting yang inklusif dalam berbagai kegiatan masyarakat: politik, ekonomi, sosial, kesehatan, bisnis, hiburan, hukum, dan sebagainya. Keberadaan hantu muncul di mana-mana, sehari-hari, tidak misterius, tidak abstrak, dan bukan sesuatu yang menakutkan lagi. Ia menjadi bagian perbincangan yang menggairahkan, menjadi sesuatu yang sangat akrab. Hampir sebagian besar lini perbincangan, wacana hantu bisa keluar masuk tanpa persoalan.

Secara dialektis hal itu merupakan bagian dari dampak kemajuan teknologi. Dalam berbagai cara, teknologi, terutama teknologi audio-visual mampu menghadirkan keberadaan hantu hingga menjadi kasat mata, dapat menelusup ke ruang-ruang publik, dan dikemas dengan cara yang amat menarik, sedikit horor, tetapi tidak jarang lucu dan menyenangkan. Hantu saat ini sudah menjadi kawan, teman bisnis yang sangat komersial. Acara-acara seperti *Pemburu Hantu*, *Dunia Lain*, *Percaya Tidak Percaya*, *UK-UK*, juga sejumlah sinetron yang bertokohkan hantu adalah sejumlah contoh kecil yang dapat kita saksikan di televisi kita.

Itulah sebabnya, saat ini, seseorang yang dikenal sebagai ahli hantu, atau semacam paranormal, dukun, atau sejenis itu, menjadi orang terkenal, sibuk, dan ditanggap ke sana kemari. Mereka dipercaya dapat menerangkan banyak hal terhadap satu fenomena yang mayoritas orang tidak dapat menjelaskan sosok dan keberadaan hantu. Mereka dipercaya dapat meramal berbagai kejadian, baik yang terselubung maupun yang akan datang. Bahkan mereka dipercaya dapat merubah sesuatu, berdasarkan tujuan tertentu, berkat kemampuan kerja samanya dengan hantu-hantu itu.

Dan di balik semua itu, tentu saja mereka mendapat imbalan. Kita tahu, banyak paranormal dan atau dukun yang kaya raya. Orang-orang seperti Ki Gendeng Pamungkas, Permadi, Joko Bodo, teman-teman kita di Tim Pemburu Hantu, adalah sedikit contoh orang sukses yang kaya raya berkat kemampuannya menguasai dunia hantu. Kita tidak menuduh mereka membisniskan kemampuan mereka hanya untuk cari uang. Karena toh banyak juga orang yang merasa berterimakasih kepada mereka berkat pertolongannya. Selalu pula mereka para dukun dan paranormal itu mengatakan bahwa apa yang bisa mereka bantu semata-mata karena kehendak Allah Yang Maha Berkuasa.

* * *

Terlepas dari itu, memang, fenomena dan maraknya masalah perhantuan selalu menjadi polemik. Secara sederhana sumber polemik itu dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori. Pertama, antara mereka yang percaya dan masih tidak percaya. Pada umumnya, latar belakang kepercayaan dan ketidakpercayaan itu berdasarkan interpretasi mereka terhadap agama yang mereka anut. Orang Islam misalnya, percaya dengan adanya jin dan setan, tetapi konsep atau istilah hantu masih belum selesai.

Kedua, ada yang percaya atau tidak percaya semata-mata karena rasionalitas seseorang dalam menafsirkan sesuatu yang nyata atau tidak nyata. Dalam konteks ini, bagi mereka yang tidak percaya, karena yang tidak nyata, yang tidak kasat mata, yang tidak empiris, adalah sesuatu yang tidak dapat dipercaya, tak terpikirkan, bahkan tak perlu dipikirkan. Biasanya mereka akan percaya jika telah mengalami secara empiris, mengalami sendiri fenomena hantu itu.

Ketiga, tidak tertutup kemungkinan adalah mereka yang antara percaya dan tidak percaya, baik karena interpretasi individual terhadap agama maupun rasionalitas mereka dalam memahami sesuatu yang memang selalu menimbulkan keraguan tersebut. Dalam hal ini yang penting adalah tidak ada satu keharusan pun yang dapat memaksa, atau perlu dipaksa, apakah seseorang perlu percaya kepada hantu atau tidak. Biarkanlah itu menjadi kepercayaannya sendiri-sendiri.

Sisi lain dari polemik tersebut adalah dengan mempertanyakan kenapa justru hantu yang dipilih sebagai sosok atau tokoh kita hari-hari ini. Seperti diketahui, banyak sinetron yang mengandalkan hantu, jin, peri/bidadari, kekuatan-kekuatan gaib, dan sebagainya, untuk mengatasi banyak masalah. Sisi ini memperlihatkan ketidakpercayaan manusia akan kemampuannya sendiri untuk mengatasi masalah. Atau memang terbukti, paling tidak di Indonesia, orang Indonesia tidak dapat mengatasi masalahnya sendiri yang sudah bertumpuk.

Kita tahu, masalah korupsi, konflik-konflik horisontal atau vertikal, penyelewengan hukum, kriminalitas politik, ekonomi, dan sebagainya, hingga hari ini tidak pernah terselesaikan secara memadai. Belum lagi masalah-masalah internasional, kasus TKI, bagaimana mengamankan pulau-pulau dan perairan Indonesia nun jauh di pinggir-pinggir Indonesia. Yang pasti, berbagai masalah tersebut menyebabkan Indonesia tersungkur menjadi salah satu negara paling menderita dan melarat di dunia.

Kemungkinan lain kenapa hantu menjadi pahlawan, karena manusia tidak mau bersaing untuk menokohkan atau menghancurkan manusia lain sebagai penyelamat. Orang itu kalau bisa menjadikan pahlawan dirinya sendiri. Namun, karena kemampuan itu ternyata sulit diraih, atau memang tidak memiliki kemampuan yang lebih, maka sosok hantu, sesuatu yang hampir tidak tergugat, dan sangat mungkin tidak relevan dijadikan saingan, sehingga hantu sajalah yang menjadi pahlawan. Siapa yang cemburu jika hantu dapat menyelesaikan banyak masalah. Dia bukan saingan manusia.

Kemungkinan lain, mungkin semacam sikap ketidakberdayaan manusia memahami dirinya. Memang, selalu ada sikap dan rasa penasaran ketika manusia memahami kemanusiaannya, dan hingga hari ini, dalam segala kompleksitas perspektif teoretis, manusia itu secara mendasar masih dianggap misterius, tidak terselesaikan upaya memahaminya. Hantu juga misterius, dan menimbulkan rasa penasaran. Akan tetapi, ia bisa menjadi refleksi dari rasa penasaran itu sendiri. Yang pasti, hantu tidak pernah menggugat bagaimana dia dipahami atau bahkan mungkin diperlakukan.

* * *

Akan tetapi, saya punya misi lain dengan tulisan ini. Para dukun dan paranormal itu selalu mengatakan bahwa sosok hantu, jin, setan, dan sebagainya itu bukanlah makhluk yang sempurna. Manusia adalah makhluk yang sempurna. Mereka bisa ditaklukkan. Artinya, manusia justru memiliki peluang untuk mengatasi dan mengelola keberadaan hantu, yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia.

Nah, kita tahu saat ini para dukun dan paranormal, dalam banyak hal bekerja masih dalam koridor menolong manusia lain, orang per orang. Mungkin pula menolong kelompok-kelompok tertentu demi tujuan yang beragam. Dalam kehidupan politik dan ekonomi Indonesia, misalnya, dunia paranormal dan dukun berperan penting bagi tujuan-tujuan tertentu. Di sisi lain para dukun itu sebagian besar juga telah menikmati kemampuan dari kelebihanannya dengan imbalan materi. Walaupun mungkin pernyataan ini sedikit berlebihan.

Saya justru ingin menantang para dukun dan paranormal itu untuk tujuan yang lebih mulia dan besar. Dengan kemampuannya mengatasi dan mengelola

dunia hantu, kemampuan itu dimanfaatkan untuk menyelamatkan Indonesia. Misalnya, menyelamatkan pulau dan perairan Indonesia nun jauh di pinggir-pinggir sana, memburu para koruptor dan para penjahat lainnya, atau apa sajalah demi perbaikan Indonesia. Sambil menolong masyarakat, kerahkan pasukan hantu ke tempat-tempat tersebut, atau tangkap para koruptor dan penjahat dalam segala cara.

Dalam hal ini sangat mungkin para koruptor dan penjahat itu punya dukungan dukun atau paranormal juga. Oleh karena itu, bersatulah para dukun dan paranormal, selamatkan Indonesia dari kehancuran. Anda boleh mengambil sedikit keuntungan dari pekerjaan tersebut, tapi kita harus kompak. Yah, mana tahu. * * *

(Esei Empat)

NEGARA ARTIS, MEDIA, ATAU PARNORMAL?

Belakangan ini, semakin banyak para artis yang menjadi pejabat, baik setingkat (wakil) gubernur, bupati, atau anggota legislatif di pusat ataupun daerah. Di antara mereka sejumlah artis lain sudah antri menjadi calon bupati atau gubernur. Tidak kurang, Dewi Persik pun mengaku sudah diminta parpol tertentu untuk dijadikan caleg.

Apa yang sedang terjadi di negara kita ini?

Dulu ada cerita bahwa jika Anda ingin menjadi orang sukses, maka sebaiknya Anda bercita-cita menjadi tentara. Dengan menjadi tentara, Anda bisa menjadi pejabat, menjadi anggota DPR, gubernur, bupati, camat, mubalik, dan menjadi pengusaha sekaligus. Itulah sebabnya, pada zaman Orde Baru, negara kita disebut sebagai negara militer. Hampir seluruh lini jabatan penting dipegang oleh para militer.

Sekarang semuanya berubah. Jika Anda ingin menjadi sukses, maka bercita-citalah menjadi artis. Dengan menjadi artis, maka Anda bisa menjadi gubernur, bupati, atau anggota legislatif, dan tentu menjadi mubalik dan pengusaha. Sangat mungkin ke depan (sementara lagi) negara kita menjadi negara artis.

Tentu fenomena ini bukan gejala baru. Di Amerika, beberapa aktor terkenal sudah mendahului menjadi gubernur atau bahkan presiden. Ronald Reagan yang sempat menjadi presiden Amerika, pada dasarnya adalah seorang artis.

Kembali ke pertanyaan semula, apa yang sedang terjadi di negara kita ini dan ke mana arah perkembangan tersebut?

Kuasa Media

Seperti halnya berkarier dalam militer, menjadi artis terkenal itu tidak mudah. Menjadi artis itu perlu kerja keras, disiplin, dan bakat. Dan di luar itu adalah keberuntungan, atau nasib baik. Banyak orang yang bisa bekerja keras dan disiplin, tapi tidak memiliki keberuntungan yang baik. Akhirnya, ia hanya bisa menjadi artis jalanan.

Di luar faktor di atas, hal yang tidak kalah pentingnya adalah faktor media (massa). Faktor terpenting dan utama yang membuat orang sukses adalah ketika ia menjadi terkenal. Media massalnya yang memiliki kemampuan membuat seseorang menjadi terkenal. Ketika seseorang telah terkenal, maka masyarakat akan memilih yang dia kenal daripada tidak sama sekali.

Artinya, di sisi lain, saat ini pun negara kita adalah negara media. Yakni sesungguhnya yang berkuasa itu, seperti militer yang berkuasa, adalah media massa. Dalam sisi ini, media massa ikut bertanggung jawab dalam mengontrol popularitas seseorang sehingga ia menjadi artis terkenal dan kemudian menjadi pejabat penting.

Yang perlu dipesankan kepada media adalah bahwa media selayaknya mempopulerkan seseorang yang memiliki kemampuan ekstra (lebih) sehingga seseorang memang layak “diartiskan”. Bukan karena dia cantik atau tampan, atau karena memiliki koneksi (dan uang). Artinya, seseorang yang memiliki *track record* yang unggul dan memiliki kecerdasan memadai.

Kita tahu, artis itu juga manusia dan warga Indonesia dan berhak menjadi pemimpin di negeri ini. Dengan demikian, jika perlu, media juga memiliki kemampuan dalam “menskenario” dan “menjagokan” pemimpin masa depan. Saya kira, banyak orang berbakat di negeri kita ini yang bisa “diartiskan” dan kemudian “direkayasa” untuk menjadi pejabat atau pemimpin.

Jadi Boneka Parpol

Masalahnya adalah, di balik itu, bahwa sebetulnya parpollah yang menyetir praktik dan realitas perpolitikan kita. UU politik dan pemilu (masih) hanya memberi peluang kepada parpol untuk mencalonkan legislatif dan eksekutif. Hingga kini calon independen juga tidak (belum) mendapat tempat dalam dunia politik Indonesia.

Padahal kita tahu, dan parpol pun tahu, bahwa kredibilitas parpol kita nyaris kehilangan rasa percaya diri dan memiliki citra buruk di mata masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa parpol hanya menghabiskan uang rakyat, parpol hanya dijadikan sarana untuk mencari nafkah dan kekayaan, dan citra parpol yang berideologikan kekuasaan dan uang. Kenyataan ini semakin sulit dibantah ketika banyak orang partai yang bercokol di legislatif dan eksekutif tertangkap basah bermain kotor.

Sebagai akibatnya, masyarakat tidak peduli parpol, karena tidak ada parpol yang bisa mempertahankan dirinya sebagai suatu parpol yang ideal dan bersih. Hal itu juga didukung kenyataan bahwa banyak parpol tidak memiliki ideologi yang konsisten dan teruji. Hal itu terlihat dari banyaknya parpol melakukan koalisi “selingkuh” dengan berbagai parpol lain, hanya demi agar calon mereka dalam pilkada di daerah tertentu dapat menang.

Padahal, parpollah yang berkuasa mengusung siapa yang menjadi anggota DPR(D), bupati, gubernur atau presiden. Karena ambisi parpol untuk mendapatkan kekuasaan dan uang, maka parpol dengan segala cara merebut kesempatan tersebut. Salah satu cara adalah kemampuan parpol membaca “selera” masyarakat.

Salah satu hasil bacaan tersebut adalah masyarakat membutuhkan figur yang terkenal, muda, enerjik, kalau perlu tampan atau cantik. Terbukti, sebagian dari mereka berhasil menjadi wakil gubernur, bupati, atau menjadi anggota legislatif.

Kemudian, kita tahu bahwa para artis yang manjadi pajabat tersebut berhutang kepada parpol. Saya tidak pernah merendahkan kemampuan artis menjadi pemimpin, walaupun pengalaman mereka dalam dunia politik sangat minim. Menjadi pemimpin itu tidak sulit. Yang sulit adalah proses menjadi pemimpin dan proses memilih staf (ahli) yang bagus.

Yang menjadi masalah adalah bahwa mereka para artis yang menjadi pejabat tersebut tentulah berhutang budi pada parpol yang mengusung dan menyebabkan mereka menjadi pemimpin. Cara mereka membayar hutang budi itu adalah dengan “membayar” jabatan atau proyek-proyek yang secara khusus untuk orang-orang parpol tertentu tersebut.

Dalam praktik ini, kolusi pun terjadi lagi, bahkan mungkin korupsi karena perputaran uang ada di lingkaran mereka. Terlepas dari itu, pada akhirnya, yang berkuasa adalah parpol itu sendiri. Padahal, banyak parpol yang ideologinya hampir tidak berjuntrung dengan ideologi dan kepentingan rakyat. Orang bilang, keuangan yang maha kuasa.

Mutu negara kita, jika memang dikuasai oleh para artis, dan kemudian hanya menjadi boneka parpol, tentulah bukan sesuatu yang memberi harapan banyak. Kecuali jika parpol kita mau berbenah diri, dan menjadikan ideologi sebagai basis perjuangan yang layak dipertahankan secara konsisten dan teruji. *

* *

(Esei Lima)

PEMILU DALAM PERSPEKTIF SEJARAH-BUDAYA

Secara historis, masyarakat Indonesia tidak memiliki tradisi yang cukup berarti dalam memilih pimpinan secara langsung. Memang, dalam skala yang sangat terbatas, masyarakat Indonesia punya sedikit pengalaman dalam memilih kades. Akan tetapi, dalam budaya-budaya lokal kita itu, karena ada faktor-faktor kolusi, nepotisme, sistem kekerabatan, budaya *ewuh-pekewuh*, bahkan politik uang, maka proses pemilihan pimpinan lokal itu sangat sering berjalan tidak demokratis.

Kita tahu, dulu, dalam sejarah dan tradisinya, pimpinan itu memang tidak dipilih. Proses untuk menjadi pemimpin, penguasa, tidak jarang didahului oleh peperangan-peperangan perebutan kekuasaan. Siapa yang kuat, yang bersiasat, bahkan yang “licik” dan “tega”, maka dialah yang akan berkuasa. Kemudian, puncak pimpinan kekuasaan itu diturunkan secara genetik.

Kemudian, dalam sejarah Indonesia modern (pasca kemerdekaan), pemilu yang dianggap demokratis terjadi tahun 1955, yakni pemilu untuk memilih anggota legislatif. Dan kelak anggota legislatif itu memilih presiden. Secara niscaya, pemilu tahun itu juga tidak pemilu memilih pimpinan secara langsung. Terlepas dari pemilu tersebut dianggap demokratis, posisi Soekarno yang diusung

partai besar seperti PNI, tak pelak telah memastikan dirinya untuk menjadi presiden.

Tradisi pemilu itu diteruskan pada masa Orde Baru, bahkan dalam kondisi yang semuanya serba diatur. Hampir semua proses pemilu direkayasa sedemikian rupa sehingga dalam praktiknya masyarakat Indonesia tidak memiliki pengalaman apapun dalam memilih pimpinan secara langsung. Untuk pemilu di atas kades, seperti pemilihan bupati, gubernur, dan presiden, juga pemilihan langsung anggota legislatif, praktis masyarakat Indonesia baru berpengalaman lima tahun terakhir ini.

Persoalannya adalah apa dampak dan implikasi-implikasi ketika masyarakat Indonesia saat ini harus memilih pimpinannya secara langsung, baik pemilihan legislatif, dan terutama untuk posisi eksekutif. Persoalan itu akan dilihat, terutama, dalam mekanisme dan proses-proses kebudayaan kita. Kebudayaan yang dimaksud di sini lebih dalam konteks sesuatu yang dianggap dominan.

* * *

Paling tidak terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan langsung itu, yakni (1) kondisi-kondisi kebudayaan, (2) masyarakat (pemilih), (3) calon pemimpinnya, dan (4) peraturan dan mekanisme pemilunya. Keempat hal ini tentu tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang terpisah, tetapi saling terintegrasi antara satu dengan yang lain.

Kondisi-kondisi kebudayaan. Seperti telah disinggung, kita tidak memiliki kecanggihan apapun dalam memilih pimpinan secara langsung. Kebudayaan kita tidak mengajarkan mekanisme dan cara-cara bagaimana memilih pimpinan. Memang, tentu mekanisme itu bisa dipelajari. Dalam kondisi itu, kelak hal yang akan terjadi adalah bahwa masyarakat, mau tidak mau, secara langsung hanya dituntun, seperti orang buta, dalam memilih pimpinannya. Hal itu berjalan paralel dengan kondisi kedua berikut.

Kondisi masyarakat. Walaupun proses pembebasan buta aksara dan *melek* baca secara kuantitatif Indonesia merupakan salah satu negara yang paling berhasil di dunia, tetapi itu tidak berjalan paralel dengan peningkatan *melek* politik. Kondisi itu selain karena konstruksi kebudayaan, secara historis politik di Indonesia memberikan citra yang pahit dalam perjalanannya.

Karena citra yang pahit itu, hampir sebagian besar masyarakat Indonesia memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap realitas politik. Sebagian besar *cuek* dan tidak mau tahu, sebagian yang lain melihat dari sisi-sisi negatif. Sebagian kecil (elite) memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan. Akibatnya, politik pemilu berjalan rancu, tumpang tindih, dan penuh dengan eksperimentasi yang tak kunjung mendapatkan bentuknya.

Situasi calon pemimpin. Berbeda dengan kedua kondisi di atas, orang Indonesia mendapat pengalaman historis yang cukup berarti bagaimana merebut posisi pimpinan kekuasaan. Itulah sebabnya, calon pimpinan (capres dan cawapres) di Indonesia demikian banyak.

Dalam prosesnya, sejarah mengajarkan bagaimana merebut posisi pimpinan kekuasaan itu dalam berbagai cara. Misalnya, bagaimana merebut posisi pimpinan secara tidak *fair*, mengandalkan modal kapital (uang) dan modal sosial

(popularitas) secara tidak proporsional. Calon pimpinan juga melakukan kasak-kusuk (kolusi) dengan nuansa permusuhan dan kebencian. Sejarah juga mengajarkan jika perlu melakukan kampanye hitam, pembunuhan karakter (dulu melakukan pembunuhan terhadap lawan-lawan politik), dan sebagainya.

Belakangan, terdapat lembaga-lembaga (pemerintah dan nonpemerintah) yang mencoba menegakkan proses pemilu secara demokratis. Akan tetapi, kita pun tahu bahwa institusionalisasi politik belum berhasil di negeri kita ini. Masih begitu banyak peluang dan celah sehingga pelembagaan pemilu itu masih bisa digadaikan, mungkin karena kekuatan uang, mungkin karena kekuatan pengaruh politik lainnya. Hal ini berjalan paralel dengan lemahnya penegakkan hukum di Indonesia.

Peraturan dan mekanisme pemilu. Pengaturan dan mekanisme pemilu untuk pilihan legislatif dan eksekutif secara langsung memang sedang digodog terus menerus. Karena kita memang belum cukup berpengalaman, maka hingga hari ini proses peraturan dan mekanisme masih dalam perdebatan.

Hal menggelikan adalah bahwa perdebatan terjadi tidak untuk mempertimbangkan kemapanaan peraturan dan mekanisme itu sendiri demi kemapan pelembagaan bernegara jangka panjang. Akan tetapi, perdebatan lebih mempersoalkan apakah peraturan dan mekanisme itu merugikan atau menguntungkan partai, atau calon pimpinan. Itulah sebabnya, perdebatan dalam wacana tersebut menyebabkan peraturan dan mekanisme pemilu selalu berubah-ubah, tergantung kelak siapa yang berkuasa dan ingin mempertahankan kekuasaannya.

Implikasinya. Dalam kondisi-kondisi di atas, maka dapat dipastikan politik pemilu dan kemunculan calon pemimpin dan pemimpin kita bukan berdasarkan suatu proses pilihan sadar rakyat. Rakyat tidak lebih menjadi bagian dari rekayasa politik yang berjalan dengan tekanan, kepalsuan, dan tipu-muslihat.

Memang, seperti terbukti pada tahun 2004, pemilihan legislatif dan presiden berjalan dengan lancar. Akan tetapi, siapapun presiden dan wapres yang terpilih, maka secara kultural ia tidak akan mendapatkan dukungan dengan kesadaran budaya berpolitik masyarakatnya. Dalam perjalanannya, ia akan selalu mendapatkan ancaman, atau akan banyak pihak-pihak yang secara kultural memusuhinya.

Begitulah politik kekuasaan kita berjalan, dari waktu ke waktu. Jika tidak ada kondisi kultural yang memaksa dengan cetak biru yang mapan, maka secara kultural politik pemilu kita belum menjanjikan apa-apa. * * *

(Esei Enam)

BANTULAH PARA KORUPTOR

Wacana berita dan analisis tentang korupsi dan koruptor sering memojokkan dan menyalahkan para koruptor. Padahal, adalah kenyataan bahwa di Indonesia melakukan korupsi itu mudah. Melakukan korupsi juga sangat dimungkinkan oleh sistem birokrasi yang lemah. Selain itu, korupsi secara relatif biasanya dilakukan secara bersama, tahu sama tahu.

Tidak heran jika Indonesia memiliki prestasi tinggi soal korupsi. Indonesia memasuki lima besar negara paling korup di dunia. Hampir dapat dipastikan bahwa korupsi memberikan kontribusi penting terhadap kemiskinan dan kesengsaraan rakyat Indonesia. Hampir semua cara mengatasi kemiskinan tidak ada gunanya kalau korupsi tidak bisa diberantas.

Dapat dipastikan korupsi itu salah dan merugikan negara, tetapi lebih-lebih merugikan rakyat. Itulah sebabnya, di mana pun, kapan pun, korupsi harus dibumihanguskan, dimusuhi, dilawan, dan dijauhi. Pemojokan kepada koruptor dapat dimaklumi.

Tetapi kita tahu, bahwa korupsi tidak bisa diberantas jika hanya dimusuhi dan dicaci-maki. Ketika dicela dan dihujat, para koruptor akan melawan dalam berbagai cara justru karena ia telah mendapat hukuman hujatan dan caci-maki. Karena merasa diserang dan dimusuhi, secara alamiah para koruptor akan membela dirinya.

Bantulah Para Koruptor

Tentu dalam berbagai cara pula, kita perlu mengubah strategi dan cara bagaimana mengurangi atau paling tidak sedikit menekan terjadinya korupsi. Salah satu cara yang bisa ditawarkan adalah bantulah para koruptor. Kita perlu menolong para koruptor untuk beberapa hal.

Bantulah koruptor dengan cara tidak dicaci-maki dan dihujat sehingga mereka tidak merasa mendapat hukuman dan sanksi secara sosial dan moral. Dengan cara itu, tidak ada alasan bagi para koruptor untuk telah merasa mendapat hukuman. Tidak ada alasan bagi para koruptor untuk melihat atau menempatkan masyarakat sebagai musuhnya.

Bantulah para koruptor dengan cara melindunginya dari berbagai tekanan dan teror. Kita tahu bahwa banyak koruptor justru tidak bisa membuka mulutnya karena ada kekuatan lain yang mengancamnya jika mereka buka mulut. Bantuan kepada koruptor diperlukan agar mereka merasa kuat dan mendapat dukungan untuk mengungkap bahwa korupsinya bukan dilakukan seorang diri, tetapi karena mendapat dukungan secara sistemik atau karena ada yang mendalangnya.

Bantulah para koruptor dari godaan para penegak hukum yang korup. Kita tahu bahwa para koruptor itu biasanya menjadi "ATM" para pengacara, polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya. Jika masyarakat kompak melindungi para koruptor dari para penegak hukum yang korup, maka mereka telah mendapat kekuatan yang signifikan untuk berani melawan para maling resmi tersebut.

Bantulah para koruptor dengan memberi jaminan bahwa jika mereka mau mengembalikan harta korupsinya, jika ia mau membuka kedok jaringan kejahatan korupsinya, maka mereka tidak akan dimusuhi dan bisa kembali menjadi warga biasa secara baik-baik.

Bantulah para koruptor, sayangi mereka, dukung mereka, agar berani berkata dan berbuat jujur. Hal ini penting agar mereka mendapat kekuatan moral untuk memusuhi dirinya sendiri yang telah bersalah, dan memiliki kekuatan untuk membuktikan kesalahan atau kebenaran.

Menegakkan Kepercayaan

Ada banyak hal yang hilang dalam diri masyarakat Indonesia. Salah satu hal yang hilang itu, dan sekaligus paling parah, adalah kepercayaan terhadap sesama. Apa sebab hal itu hilang, dan apa implikasinya?

Penyebab hilangnya kepercayaan di Indonesia adalah bahwa secara historis kita dicontohkan oleh para pemimpin untuk terlalu mudah dan banyak berjanji, tetapi sangat sedikit bukti kebenaran dari janji tersebut. Kita diminta saling menolong dan membantu, tetapi terbukti kalau ada masalah, kita memperjuangkan nasib kita sendiri-sendiri.

Kita tahu sama tahu bahwa begitu banyak kebusukan di antara kita. Contoh kecil para pelajar yang nyontek, para mahasiswa yang buat paper dengan cara *copy paste*, dan sebagainya. Dan kita merupakan aktor yang terlibat dalam permainan tersebut. Mereka yang jujur akan kalah dan tidak bisa bersaing. Orang Jawa bilang, *jujur ajur*, atau *jujur kujur*.

Singkat kata, kita menjadi tidak (mudah) percaya kepada siapapun, bahkan mungkin kepada diri sendiri. Sebagai implikasinya, kita tidak (mudah) percaya apakah kita bisa membangun kehidupan menjadi lebih baik. Kita tidak percaya terhadap masa depan. Untuk meyelamatkan diri sendiri terhadap ketidakpercayaan masa depan, kita perlu “nabung” sebanyak-banyaknya. Hal paling mudah menabung itu adalah dengan cara korupsi.

Satu hal yang paling mendesak untuk diperbaiki adalah rasa percaya terhadap sesama dan kepercayaan terhadap masa depan yang lebih baik. Kepercayaan bisa dibangun dengan mengubah paradigma berwacana. Jika kita suka mencela dan menghujat, mungkin perlu belajar lebih banyak memuji dan berterimakasih. Menurut sebuah riset, sebagai bangsa yang katanya ramah, kita termasuk bangsa yang pelit berterimakasih dan memuji.

Karena tidak percaya, kita sering melihat orang lain sebagai saingan atau musuh. Untuk melawan itu, mungkin pada awalnya kita perlu mempersiapkan diri menjadi martir. Perubahan sosial dan budaya memang membutuhkan martir-martir. Kita harus percaya terhadap perubahan positif, dan percaya bahwa martir itu indah. Hidup ini cuma sekali, tetapi harus berarti. ***